



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KECAMATAN GEMOLONG

Jln. Ngembatkembang Kragilan Gemolong



RENJA TAHUN 2025 KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Pertolongan-Nya sehingga rencana kerja (Renja) Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Gemolong Tahun 2025 disusun untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kecamatan Gemolong berkewajiban menyusun rencana kerja (Renja) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada rencana strategis (Renstra) Kecamatan Gemolong Tahun 2021-2026 maupun RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan bersifat indikatif. Selanjutnya, dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Kecamatan Gemolong tahun 2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua dan memberikan manfaat kebaikan bagi Kecamatan Gemolong. Selanjutnya, kami menyadari bahwa Renja Kecamatan Gemolong Tahun 2025 ini tidak luput dari kekurangan, oleh karenanya kami terbuka terhadap kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 17 Juli 2024

Camat Gemolong



ANCIL SUDARTO, S.A.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra..	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	32
BAB V PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025	18
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2025 ..	25
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah di rumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Gemolong Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 yang baru disusun awal tahun 2021. Renja Kecamatan Gemolong menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Sragen ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya yang tertuang dalam system SIPD Kabupaten Sragen.

Renja Kecamatan Gemolong Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Gemolong Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan yang saling terkait. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator yang dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Gemolong harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan indikator yang terdapat dalam RKPD. Lebih lanjut, target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang tertuang dalam dokumen RKPD juga menjadi pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun 2025.

Keterkaitan Renja Kecamatan Gemolong dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Gemolong merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja

Kecamatan Gemolong merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Renja Kecamatan Gemolong tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**. Tema ini menjadi acuan Kecamatan Gemolong dalam penyusunan prioritas kegiatan tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Gemolong Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan program pembangunan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kecamatan Gemolong 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya akan menggambarkan rencana kegiatan berikut sasaran, lokasi dan besaran anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Gemolong Tahun 2025 adalah:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Mewujudkan program prioritas pembangunan Kecamatan Gemolong tahun 2025 yang lebih terukur dan lebih optimal;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Gemolong merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kecamatan Gemolong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah sebuah dokumen akuntabilitas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan 2024. Sejalan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Renja Kecamatan Gemolong tahun 2023 telah dilaksanakan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2023 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Hasil evaluasi dari pelaksanaan Renja 2023 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada. Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dan memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah : semua kegiatan memenuhi 100 % target kinerja yang direncanakan sebelumnya.
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja dari semua kegiatan adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Gemolong maupun instansi terkait termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kecamatan Gemolong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2024		Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
07.01	Bidang Urusan Kecamatan									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	100	100	98	98%	100	100	100%
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	39	39	37	95%	39	37	95%
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang tercukupi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%

07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>88</i>	88%	<i>100</i>	100	100%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [unit]	6	0	4	3	75%	3	6	100%
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	410	21	33	33	100%	350	404	99%
07.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	100%	<i>100</i>	100	100%
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	100%	<i>100</i>	100	100%
07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54	18	18	18	100%	18	54	100%
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2	4	4	100%	5	5	100%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	100	100	100	100%	100	100	100%

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.2.02.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100	0	0	0	0	0	0	100%
7.01.2.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	0	0	0	0	0	0	100%
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase sarpras kelurahan kondisi baik								
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	416	187	106	106	100%	123	416	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	8	8	8	100%	10	10	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	353	0	189	189	100%	180	369	100%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350	70	70	70	100%	300	440	100%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Regional, dan Nasional Lokal	300	30	30	30	100%	160	220	100%

07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	0	1	1	100%	1	2	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	0	0	0	0%	0	0	100%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	1	1	1	100%	1	3	100%

KETERANGAN :

n : Tahun perencanaan (2025)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinarja Utama (IKU) Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. Sumber Data : Kecamatan

Berdasarkan IKU tersebut di atas, maka akan dianalisis kinerja pelayanan Kecamatan Gemolong yang dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gemolong

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 s.d Tw.2	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Predikat LKjIP			62	63	64	65	59,60	66,75	64	65	
1	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi			100	100	100	100	100	50	100	100	
	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi			100	100	100	100	100	50	100	100	

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39	39	39	39	39	37	39	39	
	<i>Prosentase administrasi umum yang tercukupi</i>			100	100	100	100	100	50	100	100	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1	4	1	1	0	4	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	8	1	1	0	8	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	4	1	1	0	4	1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	1	4	1	1	0	4	1	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	12	1	1	0	12	1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	1	4	1	1	0	4	1	
	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			100	100	100	100	100	88	100	100	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [unit]			4	3	29	3	0	3	29	3	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			33	350	3	350	21	33	3	350	
	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	4	1	1	0	4	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	1	12	1	1	0	12	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	4	1	1	0	4	1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	1	12	1	1	0	12	1	
2	<i>Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18	18	29	18	18	18	29	18	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4	5	4	5	2	4	4	5	
B	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			85	85	85	85	88,25		85	85	Nilai IKM belum keluar
3	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan			100	100		100	100	100		100	

	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1	1	4	1	1	0	4	1	
	<i>Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			0	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	1	1	1	0	0	1	1	
	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1	1	4	1	1	0	4	1	
4	Persentase lembaga desa yang aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase sarpras kelurahan kondisi baik											
	<i>Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1	1	4	1	1	1	4	1	
	<i>Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			106	123	93	123	187	56	93	123	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8	10	13	10	8	10	13	10	
5	Persentase penanganan laporan kejadian			100	100	100	100	100	0	100	100	
	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>			100	100	100	100	100	0	100	100	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1	1	4	1	1	0	4	1	
6	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik			100	100	100	100	100	50	100	100	
	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah</i>			100	100	100	100	100	50	100	100	

	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			189	0	0	180	0	0	0	180	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			70	300	850	300	70	0	850	300	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Regional, dan Nasional Lokal			30	160	500	160	30	400	500	160	
	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu			100	100	100	100	100	0	100	100	
	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>			<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1	0	0	1	0	0	0	1	
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0	1	1	0	0	0	1	0	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1	1	2	1	1	0	2	1	

Kecamatan Gemolong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah kecamatan saja, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis darisudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Gemolong menyelenggarakan Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Administrasi keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Pengadaan Barang Milik Penunjang urusan pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dan *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dan *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah) dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa).

Keterbatasan sumber daya manusia di kantor Kecamatan Gemolong tentunya harus bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat sistem kinerja dan memberdayakan masing-masing personil sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dibangun pola kebersamaan di mana pelayanan menjadi tanggung jawab semua pegawai tidak sebatas tanggung jawab per seksi. Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibangun sistem pelaksanaan tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang melibatkan lintas seksi. Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan perangkat daerah, demikian juga di Kecamatan Gemolong. Masyarakat menilai kinerja kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan pelayanan secara baik, maka akan menilai bahwa kinerja perangkat daerah itu baik. Pelayanan di Kecamatan Gemolong dari sisi administrasi merupakan pelayanan yang paling banyak intensitasnya, berupa pelayanan administrasi kependudukan, legalisasi, surat keterangan, perijinan dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- 2. Kualitas sumber daya manusia;
- 3. Pertumbuhan ekonomi;
- 4. Kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Kualitas infrastruktur wilayah;
- 6. Kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud, isu strategis pembangunan daerah yang dapat didukung secara langsung oleh Kecamatan adalah berfokus pada permasalahan **kualitas tata kelola pemerintahan**. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Gemolong, perlu perhatian yang serius dan fokus dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan;
- b. Predikat LKjIP di Kecamatan.

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua indikator kinerja tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Gemolong yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa
	Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum
	Kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat
	Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal
Masih kurangnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Gemolong sebagai berikut:

c. Faktor Tantangan (*Threat*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;
- 2) Koordinasi antar instansi dan Pemerintah Desa yang belum maksimal;
- 3) Era keterbukaan informasi menuntut budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 4) Semakin terbukanya informasi di era teknologi informasi menuntut sikap aparatur birokrasi untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Hubungan dengan *stakeholder* cukup baik;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Terbukanya kesempatan secara luas bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui sekolah formal maupun bintek teknis.

Berkenaan dengan permasalahan, tantangan dan peluang yang sudah diuraikan di atas,

ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan prioritas tahun 2025 sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan perlu adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik dan dilaksanakan di setiap level struktur organisasi. Disamping itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan;
2. Untuk meningkatkan nilai IKM Kecamatan, Perlu adanya kegiatan peningkatan efektivitas pelayanan Kecamatan, diantaranya berupa forum konsultasi publik maupun penambahan personil dan peningkatan kompetensi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gemolong tahun 2025 secara umum telah sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gemolong tahun 2025. Hal ini didasarkan pada penyandingan program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan dokumen rencana startegis Kecamatan Gemolong tahun 2021- 2026. Penyandingan ini dilakukan dalam rangka memastikan program dan kegiatan yang akan dijalankan setiap tahun selaras dengan yang telah direncanakan dalam renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Sesuai peraturan, semua dokumen perencanaan OPD berupa renstra, renja dan RKA harus selaras dan saling mendukung.

Secara lebih detil, terkait penyesuaian sub kegiatan dan jumlah anggarannya dapat ditampilkan dalam tabel *review* terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Sragen di halaman berikut.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gemolong	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	4.617.566	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gemolong	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	4.938.091	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase administrasi keuangan yang tercukupi</i>	100	4.047.342	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase administrasi keuangan yang tercukupi</i>	100	4.261.162	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	4.047.342	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	4.261.162	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase administrasi umum yang tercukupi</i>	100	208.186	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase administrasi umum yang tercukupi</i>	100	281.921	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	16.557	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	16.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	68.779	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	123.801	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	89.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	103.000	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	20.880	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	25.500	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.620	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.620	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	11.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	12.000	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	29.806	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	7.910	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	29.806	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	7.910	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	237.352	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	249.812	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	6.240	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	56.621	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	53.899	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	25.990	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	40.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	149.141	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	149.273	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	94.880	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	137.286	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	59.220	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	82.200	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	35.660	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	55.086	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gemolong	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	531.334	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gemolong	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	508.680	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	100	494.718	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	100	497.066	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	3.652	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	6.000	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	491.066	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	491.066	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100	5.223	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100	5.420	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	5.223	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	5.420	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	31.394	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	6.194	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	31.394	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	6.194	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gemolong	Persentase lembaga desa yang aktif Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	100	4.133.984	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gemolong	Persentase lembaga desa yang aktif Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	100	5.734.200	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa</i>	1	584.600	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa</i>	1	588.600	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	584.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	588.600	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan</i>	100	3.549.384	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan</i>	100	5.145.600	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60	3.370.513	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93	4.819.626	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	178.871	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	325.974	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gemolong	Persentase penanganan laporan kejadian	100	24.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gemolong	Persentase penanganan laporan kejadian	100	24.360	

	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kecamatan Gemolong	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	100	24.000	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kecamatan Gemolong	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	100	24.360	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	24.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	24.360	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gemolong	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	218.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gemolong	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	115.250	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah</i>	100	218.000	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah</i>	100	115.250	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	850	18.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	850	15.250	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	60	200.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	500	100.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gemolong	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100	13.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gemolong	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100	17.900	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>	100	13.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>	100	17.900	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	8.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	7.910	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	7.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	9.990	Anggaran bertambah/ Penyesuaian rincian belanja
	JUMLAH TOTAL				9.537.884					11.338.481	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Kecamatan Gemolong didiskusikan dalam pembahasan SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gemolong dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Gemolong sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Penelaahan atau Kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Kecamatan Gemolong yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 memprioritaskan pada pembangunan di bidang pemerintahan, infrastuktur, kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sragen dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sragen baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang dan pengajuan Usulan program dari Desa lewat SIPD Berbasis Online. Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Gemolong Tahun 2024 ditetapkan 68 usulan prioritas hasil dari penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan 14 desa/kel, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di Wilayah kecamatan akan disampaikan dalam forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dan menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat

Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gemolong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Gemolong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 unit	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Gemolong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kwangen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kwangen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Ngembatpadas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Ngembatpadas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kragilan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kragilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 masuk dalam periode RPJMN 2025-2029 yang saat ini masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini BAPPENAS). Oleh karenanya, belum memungkinkan untuk dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Untuk mencapai fondasi yang kuat untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 prioritas nasional sebagai berikut:

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang disabilitas;
- Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- Pembangunan dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
- Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan nasional yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- **Prioritas ke-4** : “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang disabilitas” diantaranya berupa Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam bentuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Kegiatan PKK;
- **Prioritas ke-6** : “Pembangunan dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” berupa program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berupa pendampingan penusunan RKPDesa dan APBDesa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemolong

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah “**Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Perwujudan kemandirian ekonomi daerah;
- Perwujudan layanan investasi yang berkualitas;
- Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
- Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;
- Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat;
- Penguatan percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
- Perwujudan ketahanan pangan masyarakat;
- Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke- 4, yaitu: “**Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah**”.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Gemolong 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Gemolong adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatkan kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik,

menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Gemolong adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan
- 2. Meningkatnya kinerja kecamatan.

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.

- 2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP Kabupaten Sragen dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gemolong tahun 2025 secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemolong Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan	85
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	85
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan		Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	64,00 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	64,00 (B)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gemolong merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Gemolong 2021-2026. Program dan kegiatan ini merupakan operasional strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Gemolong sesuai tugas dan fungsinya selama periode tahun anggaran 2025.

Rencana kerja Kecamatan Gemolong tahun 2025 mencakup 6 (Enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.938.091.215
	07.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.261.162.315
	07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.261.162.315
	07.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	281.921.000
	07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000
	07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.801.000
	07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.000.000
	07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.500.000
	07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000
	07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000
	07.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	7.910.000
	07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.910.000
	07.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	249.812.000
	07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.240.000
	07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.899.000
	07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.400.000
	07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.273.000
	07.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	137.285.900

07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.200.000
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.085.900
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	508.679.696
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	497.065.696
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	491.065.696
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	5.420.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.420.000
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	6.194.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.194.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.734.200.000
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	588.600.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	588.600.000
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	5.145.600.000

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.819.626.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	325.974.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.360.000
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	24.360.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.360.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	115.250.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	115.250.000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.250.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100.000.000
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.900.000
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	17.900.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.910.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.990.000
	Jumlah	11.338.480.911

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GEMOLONG TAHUN 2025

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Gemolong tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Kecamatan adalah prioritas ke-4, yaitu: **Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.** Sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Gemolong yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, maka rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam program sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Program
7.1.1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
7.1.2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
7.1.3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7.1.4	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
7.1.5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
7.1.6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sesuai karakteristik Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur kewilayahan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan, maka pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gemolong sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2025. Selanjutnya, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator dan target kinerja serta pagu indikatif kebutuhan dananya dapat ditampilkan dalam tabel lembar berikut.

Tabel IV.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SRAGEN

No. Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif 2025	Prakiraan Maju 2026	Jenis Kegiatan	Penanggung jawab
					Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	(Rp)	(Rp)	10	11
	KECAMATAN GEMOLONG									
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah								
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	4.938.091.215	5.431.900.337		
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100	4.261.162.315	4.687.278.547		
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	4.261.162.315	4.687.278.547		Subbag PEP dan Keuangan
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Prosentase administrasi umum yang tercukupi	100	281.921.000	310.113.100		
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	16.000.000	17.600.000		Subbag Umpeg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	123.801.000	136.181.100		Subbag Umpeg
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	103.000.000	113.300.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	25.500.000	28.050.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.620.000	1.782.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	12.000.000	13.200.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	7.910.000	8.701.000		
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	7.910.000	8.701.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	249.812.000	274.793.200		
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	6.240.000	6.864.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	53.899.000	59.288.900		Subbag Umpeg
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	40.400.000	44.440.000		Subbag Umpeg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	149.273.000	164.200.300		Subbag Umpeg
07.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	<i>Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	137.285.900	151.014.490		
07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	82.200.000	90.420.000		Subbag Umpeg
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Aparatur/ pegawai Kecamatan	Kecamatan Gemolong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	55.085.900	60.594.490		Subbag Umpeg
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	508.679.696	559.547.666		
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah kegiatan koordinasi</i>	100	497.065.696	546.772.266		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	6.000.000	6.600.000		Seksi Ekbang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	491.065.696	540.172.266		Seksi Pem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100	5.420.000	5.962.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	5.420.000	5.962.000		Seksi Yanum
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	6.194.000	6.813.400		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Instansi Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	6.194.000	6.813.400		Seksi Pem
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PKK Desa/Kel, RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel Lainnya	Kecamatan Gemolong	Persentase lembaga desa yang aktif Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	100	5.734.200.000	6.307.620.000		
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		PKK Desa/Kel, RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel Lainnya	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa</i>	100	588.600.000	647.460.000		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		PKK Desa/Kel, RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel Lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	588.600.000	647.460.000		Seksi Ekbang
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		PKK Desa/Kel, RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel Lainnya	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan</i>	100	5.145.600.000	5.660.160.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		PKK Desa/Kel, RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel Lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	93	4.819.626.000	5.301.588.600		Lurah
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		PKK Desa/Kel, RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel Lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	325.974.000	358.571.400		Lurah
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kecamatan Gemolong	Persentase penanganan laporan kejadian	100	24.360.000	26.796.000		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kecamatan Gemolong	<i>persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	100	24.360.000	26.796.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	24.360.000	26.796.000		Seksi Trantib
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Anggota Paskibra Kecamatan dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	115.250.000	126.775.000		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		Anggota Paskibra Kecamatan dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah</i>	100	115.250.000	126.775.000		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Anggota Paskibra Kecamatan dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	850	15.250.000	16.775.000		Seksi Trantib

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kecamatan dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gemolong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500	100.000.000	110.000.000		Seksi Kesra
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya	Kecamatan Gemolong	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100	17.900.000	19.690.000		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya	Kecamatan Gemolong	<i>Persentase jumlah desa yang dibina</i>	100	17.900.000	19.690.000		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	7.910.000	8.701.000		Seksi Pem
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa lainnya	Kecamatan Gemolong	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	9.990.000	10.989.000		Seksi Pem
JUMLAH TOTAL							11.338.480.911	12.472.329.002		

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Gemolong sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gemolong telah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Gemolong tahun 2021-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, setiap tahun anggaran, Kecamatan Gemolong juga menyusun rencana kerja (Renja) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Kecamatan Gemolong tahun 2025 ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gemolong dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Gemolong 2021-2026. Dengan disusunnya Renja 2025 ini, Kecamatan Gemolong telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Kecamatan Gemolong Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 2021-2026 tahun ketiga dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Renja 2025 ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025. Disamping itu, jika dalam perjalanan waktu terdapat prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan, keterbatasan dana dan/atau adanya kebijakan Kepala Daerah maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen Renja 2025 ini dapat dilakukan penyesuaian (revisi) sesuai kebutuhan.

Gemolong, 17 Juli 2024

Camat Gemolong



ANGGI SUDARTO, S.A.P.
NIP. 19701003 199203 1 005